



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Samarinda

Jl. Sentosa Dalam No. 01 Kelurahan
Sungai Pinang Dalam Kecamatan
Sungai Pinang Kota Samarinda



  @BPBDSamarinda

magnificent
SAMARINDA

0811-5537-007 

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda merupakan tahun Pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2021 – 2026.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2024 nanti juga akan dilaksanakan sesuai rencana.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Samarinda, Juli 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	9
DAFTAR ISI	10
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Landasan Hukum.....	13
1.3 Maksud dan Tujuan	16
1.4 Sistematika Penulisan	17
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2021	
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA BPBD Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA BPBD Kota Samarinda.....	20
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...	47
2.4 Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	65
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	66
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	67
3.3 Program dan Kegiatan	69
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	81
 BAB V PENUTUP	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2024. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 Kota Samarinda.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024.

Renja BPBD mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Adapun visi BPBD Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah ***"Terwujudnya Lembaga dan Masyarakat Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana"***

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi BPBD Kota Samarinda tahun 2017-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana
3. Merumuskan regulasi yang mendukung upaya-upaya percepatan penanggulangan bencana
4. Mengurangi kerentanan, memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
5. Mencegah meluasnya kejadian bencana

Renja BPBD dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BPBD Kota Samarinda tahun 2024 dengan mengarah

pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Samarinda khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja BPBD Kota Samarinda Tahun 2023 adalah :

- a. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587);
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;

- j. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana ;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penggulangan Bencana ;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 309);

- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- u. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 tahun 2010, Nomor : 0199/M/PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK/07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- v. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3887 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- w. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- x. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- y. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana ;
- z. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
- å. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana ;
- ä. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda ;
- ö. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025.
- aa. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
- bb. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

- cc. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021;
- dd. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021);
- ee. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perubahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
- ff. Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 24 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk menempatkan program Penganggulangan Bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda tahun 2021 - 2026, Rencana Tata Ruang Wilayah dan memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap upaya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan.

Tujuan Internal:

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
2. Menyediakan dokumen acuan bagi BPBD Kota Samarinda dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pada setiap tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kota, APBD Propinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda.

4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di BPBD Kota Samarinda dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di BPBD Kota Samarinda dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Tujuan External:

1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kota Samarinda yang berorientasi untuk Pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap bencana.
2. Memberikan arah kebijakan terhadap upaya penanggulangan bencana, baik dalam kondisi pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
3. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa Pemerintah Daerah Kota Samarinda memiliki *concern* yang besar terhadap upaya Penanggulangan Bencana di Kota Samarinda.
4. Mensinergikan program-program dan kegiatan penanggulangan bencana dengan program-program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman resiko bencana, baik di SKPD lain, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.
5. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi dan dukungan anggaran program penanggulangan bencana yang berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja BPBD Kota Samarinda Tahun 2023, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen

RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Kota Samarinda Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPBD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPBD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas BPBD Kota Samarinda Tahun 2024.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada BPBD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**, berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD**, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Samarinda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.
- 3.3. Program dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada Bagian ini menjelaskan uraian rencana program, kegiatan, indikator kinerja beserta target capaian kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 beserta pagu indikatif anggaran nya di tahun 2024 yang akan datang mengenai program dan kegiatan nya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA BPBD KOTA SAMARINDA

Rencana Kerja BPBD Kota Samarinda adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kota Samarinda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pada tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda berupaya memenuhi beberapa sasaran kinerja yang sudah direncanakan di dalam Renstra Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bencana
2. Meningkatnya pelayanan dalam penanggulangan bencana
3. Meningkatnya pelayanan pasca bencana

Terkait dengan hal tersebut rencana kerja (RENJA) BPBD Kota Samarinda ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD Kota Samarinda selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

Tabel TC-29

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

Kode (Perangkat Daerah/ Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda																										
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					7,500,572,837			8,206,182,386		629,782,321		2,517,875,842		0		0		0		3,147,658,363		10,648,231,200		38.39	38.36	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,507,925,855			5,569,516,136		559,782,321		2,215,979,112		0		0		0		2,775,761,623		6,081,687,488		61.33	51.66	
1.05.0.00.0.00.01.0000-1-5-1-1 (Indikator perantara)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							76																		
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip				62,919,800		73	Nilai			0		14,831,300		0		0		14,831,300		77,751,300			70	24.51	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.01 - 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0		0	48,555,000	PAD		0	PAD		8739900					8,739,900		8,739,900			40	18.77	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.01 - 1		Jumlah Dokumen Perencanaan						5	Dokumen		2		2		2		2		2							40	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.01 - 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RPJMD					17	62,919,800		13,949,000			PAD		6091600				6,091,400				69,011,400			100	43.67	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.01 - 6		Jumlah LAKIP						1	Dokumen		1		1		1		1		1							100	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan					4,865,125,875		4,607,175,496		547,185,662		2,077,208,888		0		0		2,624,394,550				7,487,520,425		72.51	56.96	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.02 - 1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN					12	4,549,143,051		4,045,569,496	PAD		46958562	PAD		1904008888				2,375,594,550				6,722,757,581		100	58.67	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.02 - 1		Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan						36	Orang		36		36		36		36		36		36					100	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.02 - 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12	515,982,844		522,400,000	PAD		77600000	PAD		173200000				250,800,000				764,782,844		76.92	48.01	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.02 - 2		Gaji dan Tunjangan Non ASN yang dibayarkan						39	Orang		30		30		30		30		30		30					76.92	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.02 - 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0		0	39,404,000			PAD							0				0	40	0		
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.02 - 5		Jumlah Laporan						5	Laporan		2		2		2		2		2							40	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan					77,684,950		188,975,140		0		79,534,165		0		0		79,534,165				157,226,115		54	42.09	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.06 - 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					0	0	0	9,990,670			PAD						0		0		0	0	0	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.06 - 1		Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan						5	Jenis									0								0	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.06 - 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2	9,990,000		100,000,000			PAD		26900000				26,900,000					36,890,000		80	26.9	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.06 - 2		Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan						5	Jenis		3		3		3		3		3		3					80	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.06 - 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					5	14,970,000		14,999,100			PAD		9996400				9,996,400					24,966,400		80	66.65	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.06 - 4		Jumlah bahan logistik						25	Jenis		20		20		20		20		20		20					80	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.06 - 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					4	8,040,000		13,999,370			PAD		2988000				2,988,000					11,028,000		100	21.34	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.06 - 5		Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan						1	Laporan		1		1		1		1		1		1					100	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.06 - 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD					100	44,694,950		49,986,000			PAD		39649763				39,649,763					84,344,715		50	79.32	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.06 - 9		Jumlah SPKD						8	SPKD		4		4		4		4		4		4					50	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan					127,640,059		156,806,000			12,596,859		23,884,359		0		0		36,481,418				164,121,477		27.78	23.27
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.08 - 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12	62,319,559		93,500,000	PAD		12596859	PAD		23845559				36,481,418					98,800,977		55.56	39.02
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.08 - 2		Tagihan Rekening yang dibayarkan						36	Bukti Pembayaran		20		20		20		20		20		20					55.56	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.08 - 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					100	65,320,500		65,306,000			PAD						0		0		65,320,500			0	0	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.08 - 4		Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum						100	Bukti Pembayaran									0		0						0	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan					176,545,171		355,859,500		0		18,520,000		0		0		18,520,000					195,065,171		78.57	5.2
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.09 - 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jajaran					60	148,690,171		294,874,000			PAD		18520000				18,520,000					167,210,171		57.14	6.28	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.09 - 2		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional						7	Unit		4		4		4		4		4		4					57.14	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.09 - 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50	18,700,000		60,985,500			PAD						0			0		18,700,000		100	0	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 1 - 2.09 - 9		Jumlah Pemeliharaan Gedung						1	Gedung		1		1		1		1		1		1					100	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)																											
Predikat Kinerja																											
B R																											

1.05.0.00.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2,192,646,982		2,836,864,250		70,000,000		305,896,730			C		0	373,896,730		2,966,543,712	15.45	13.18
1.05.0.00.0.00.04.0000-1-5-3-1 (indikator program)		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap				31,76%															
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana			238,615,192	3 Jenis	423,014,000		C		3,400,000		C		0		3,400,000		242,015,192		C 0.8
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.01 - 1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/kota					0	307,887,000		PAD		3400000						3,400,000		3,400,000		C 1.1
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.01 - 1		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang di susun				0 0											C				C
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.01 - 2	Sosialisai, komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)				4 238,615,192		115,127,000										C		238,615,192		C 0
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.01 - 2		Jumlah Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)				50 kali											C				C
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan			1,480,047,462	4 Jenis	1,485,304,000		70,000,000		225,614,780		C		0		295,614,780		1,755,662,242	20.37	19.9
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.02 - 1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota				1 351,267,456		219,415,000										C		351,267,456		C 0
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.02 - 1		Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota				1 Dokumen											C				C
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.02 - 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota				104 54,083,830		84,781,000										C		54,083,830		C 0
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.02 - 2		Jumlah aparatur dan Warga negara yang ikut pelatihan				100 Orang											C				C
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.02 - 3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota				100 477,730,000		485,256,000		PAD		70000000		PAD				167197150		237,197,150	714,927,150	50 48.88
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.02 - 3		Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan puskadopsi dan sarana prasarana penanggulangan bencana				200 Orang				100		100		100		100					50
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.02 - 4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				100 259,245,000		322,067,000				PAD		48995950				48,995,950		508,238,950	33.33	15.21
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.02 - 4		Jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan				1200 Orang				400		400		400		400					33.33
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.02 - 5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/kota					0	55,841,000										C				C 0
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.02 - 5		Jumlah dokumen Pengelolaan Risiko Bencana yang di susun				2 Dokumen											C				C
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.02 - 6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan				5 192,931,015		104,271,000										C		192,931,015		C 0
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.02 - 6		Jumlah Penguatan Kelurahan/Desa Tangguh Bencana				5 Destana											C				C
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.02 - 7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota				200 90,870,899		57,004,000				PAD		9423680				8,423,680		100,294,579	100	16.53
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.02 - 7		Jumlah dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/kota yang di susun				1 Dokumen			1		1		1		1	1					100
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.02 - 9	Penyusunan Rencana Kontinjensi				1 55,919,262		82,514,000										C		55,919,262		C 0
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.02 - 9		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang di susun				1 Dokumen											C				C
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.02 - 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					0	74,135,000										C				C 0
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.02 - 10		Jumlah warga negara yang ikut pelatihan				80 Orang											C				C
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			200,512,597	3 Jenis	742,355,250		C		74,881,950		C		0		74,881,950		275,394,547	41.43	10.08
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.03 - 1	Respon Cepat Kejadian luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas					0	88,510,000				PAD		21346550				21,346,550		21,346,550		100 24.12
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.03 - 1		Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus kejadian luar Biasa				30 Menit			30		30		30		30	30					100
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.03 - 2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/kota					0	57,778,000				PAD		50000000				5,000,000		5,000,000		100 8.65
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.03 - 2		Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus darurat bencana				30 Menit			30		30		30		30	30					100
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.03 - 3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota					0	141,357,000				PAD		20160400				20,160,400		20,160,400	14.29	14.26
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.03 - 3		Jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana				3500 Orang			500		500		500		500	500					14.29
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.03 - 4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota				10 200,512,597		329,907,000				PAD		26875000				26,875,000		227,387,597	14.29	8.15
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.03 - 4		Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan penanganan logistik dan evakuasi				3500 Orang			500		500		500		500	500					14.29
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.03 - 5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana					0	33,677,250				PAD		15000000				1,500,000		1,500,000		20 4.45
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.03 - 5		Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana				50 Orang			10		10		10		10	10					20
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.03 - 6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit					0	91,326,000										C				C 0
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.03 - 6		Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk bencana non alam/husnah menakit				1 Jam											C				C
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				295,471,731	2 Jenis	185,991,000		C		0		C		0		C		295,471,731		C 0
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.04 - 1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota				1 131,415,545		78,234,000										C		131,415,545		C 0
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.04 - 1		Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana				2 Dokumen											C				C
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.04 - 2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/kota				2 162,056,186		47,599,000										C		162,056,186		C 0
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.04 - 2		Jumlah Kelembagaan				2 Kelembagaan											C				C
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.04 - 3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota					0	60,138,000										C				C 0
1.05.0.0.0.00.04.0000 - 1 - 5 - 3 - 2.04 - 3		Terjalin nya kerjasama antar kelembagaan				1 Kerjasama											C				C
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 3)																				15.45	13.18
Predikat Kinerja																				SR	SR
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program												0 629,782,521		0 2,517,875,842		C C		0 0	3,147,658,363		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				38.39	38.36
Predikat Kinerja dari seluruh program																				SR	SR

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (Output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Rencana kinerja tahunan dituangkan ke dalam Penetapan Kinerja atau perjanjian kinerja dalam bentuk indikator kinerja dengan target tertentu untuk dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja setiap tahunnya. Penetapan Kinerja BPBD Kota Samarinda Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Penetapan Indikator Kinerja BPBD Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Program)	Target
1	Mengurangi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	4 Jenis
		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang di susun	1 Dokumen
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 Orang
		Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9 Jenis

		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen
		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit
		Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	12 Dokumen
		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan
		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	20 Orang
		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 Dokumen
		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500 Orang

		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	2 Dokumen
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	59 Keluarga
		Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5 Jenis
		Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan
		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3000 Orang
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1500 Orang
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan
		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi	1 Dokumen

		KLB dan Epidemiologi Terpadu	
		Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	5 Jenis
		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0 Dokumen
		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen
		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	24 Laporan
		Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	2 Dokumen

Ke-29 target indikator kinerja tersebut diatas dicapai melalui Program Penanggulangan Bencana dengan 4 kegiatan dan 25 sub kegiatan.

B. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPBD Kota Samarinda Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai mana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Program)	Target
1	Mengurangi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	4 Jenis
		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang di susun	1 Dokumen
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 Orang
		Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9 Jenis
		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen
		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	1 Dokumen

		Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit
		Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	12 Dokumen
		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan
		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	20 Orang
		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 Dokumen
		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500 Orang
		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	2 Dokumen
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	59 Keluarga
		Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5 Jenis

		Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan
		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3000 Orang
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1500 Orang
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan
		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen
		Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	5 Jenis
		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen

	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0 Dokumen
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen
	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen
	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	24 Laporan
	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	2 Dokumen

C. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024

Melihat capaian tahun 2023 BPBD Kota Samarinda optimis dapat merealisasikan seluruh kegiatan dengan baik. Untuk tahun berjalan ini yakni Anggaran APBD Kota tahun 2024 dengan usulan sebesar Rp. 19.472.876.146,- terurai dalam 2 program, 12 kegiatan, dan 44 Sub Kegiatan, diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi Kota Samarinda **"Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban"** melalui lima pokok aspek yaitu Sumber Daya Manusia, Ekonomi Kota, Pemerintahan, Infrastruktur dan Lingkungan Kota. pada dasarnya Kegiatan BPBD Kota Samarinda Mendukung Misi Kelima Kota Samarinda, Untuk mencapai Misi ketiga tersebut BPBD Kota Samarinda mempunyai fungsi komando, koordinasi dan pelaksana terkait penyelenggaraan bencana di Kota Samarinda baik pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	82,42	8.621.716.693,00
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75	200.000.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	100.000.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	50.000.000,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50.000.000,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54 Orang	6.777.605.973,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	5.947.827.279,00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	779.778.694,00

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50.000.000,00
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39 Laporan	748.086.720,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	9.990.670,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	375.165.000,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27 Paket	42.350.000,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	38.876.050,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22 Laporan	12.000.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	269.705.000,00
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	205.650.000,00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas atau lapangan	1 Unit	183.350.000,00
2	Pengadaan Mebel	13 Unit	22.300.000,00
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Laporan	170.500.000,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	150.500.000,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	20.000.000,00
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16 Laporan	519.874.000,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30 Unit	168.285.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	316.589.000,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	35.000.000,00
B	Program Penanggulangan Bencana	0,69	10.851.159.453,00
I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	4 Jenis	610.000.000,00
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	310.000.000,00
1	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota	300 Orang	300.000.000,00

II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	9 Jenis	5.769.086.413,00
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000,00
2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	250 Orang	350.000.000,00
3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	731.299.763,00
4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	25 Unit	416.650.000,00
5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.200.000.000,00
6	Penguatan kapasitas kawasan dan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	5 Kawasan	1.000.000.000,00
7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	11 Orang	239.662.000,00
8	Penyusunan Rencana Kontijensi	1 Dokumen	250.000.000,00
9	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1000 Orang	831.474.650,00
10	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1 Dokumen	250.000.000,00
11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	250.000.000,00
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5 Jenis	2.496.073.100,00
1	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	1 Laporan	120.000.000,00
2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	120.000.000,00
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3300 Orang	1.200.000.000,00
4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	3300 Orang	851.073.100,00
5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	95.000.000,00
6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1 Dokumen	110.000.000,00
IV	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	5 Jenis	1.975.999.940,00
1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	3 Dokumen	200.000.000,00
2	Penguatan kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000,00

3	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000,00
4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	250.000.000,00
5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	200.000.000,00
6	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen	975.999.940,00

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kota samarinda Sebagai berikut :

- a. Rendahnya aksesibilitas informasi kebencanaan diseluruh wilayah Kota Samarinda
- b. Belum optimalnya jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi komando dan pelaksanaan.
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
- e. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Samarinda dalam pencapaian indikator kinerja BPBD Kota Samarinda maupun Pemerintah Kota Samarinda tidak didukung dengan sistem kerja stakeholder pendukung, sehingga ada beberapa pekerjaan yang diselesaikan melebihi target waktu yang ditentukan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka peningkatan kinerja

organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BPBD Kota Samarinda tahun 2021 – 2026, maka Arah kebijakan dan Strategi BPBD merupakan hasil dari identifikasi atas isu strategis BPBD yang dilakukan oleh BPBD terhadap isu internal dan eksternal. Strategi yang ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda untuk mewujudkan visi adalah sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, dan pembelajaran dalam pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana
2. Meningkatkan kualitas layanan administratif melalui pemenuhan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan pelaporan capaian kinerja
3. Meningkatkan sinergitas penanggulangan bencana melalui sinkronisasi, dan integrasi kegiatan penanggulangan bencana

Kebijakan :

1. Membuka kesempatan aparatur dalam meningkatkan kualitas SDM sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana
2. Memperkuat capaian kinerja yang transparan dan akuntabel.
3. Membangun koordinasi, sinkronisasi program dan pelaku penanggulangan bencana

Misi 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana

Strategi :

1. Meningkatkan cakupan pemenuhan layanan melalui pengadaan sarana prasarana kebencanaan yang sesuai standar

2. Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum pasca bencana melalui pembangunan dan perbaikan.
3. Meningkatkan cakupan pemenuhan pelayanan penangan kebakaran melalui pengadaan sarana prasarana tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan

Kebijakan :

1. Memperbaiki kualitas pelayanan, dan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang laik.
2. Membangun, merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum untuk memperbaiki daerah yang tertimpa bencana
3. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran sebagai upaya mempercepat penanganan bencana kebakaran

Misi 3. Merumuskan regulasi yang mendukung upaya-upaya percepatan penanggulangan bencana

Strategi :

1. Mempercepat pemenuhan regulasi penanggulangan bencana melalui penyusunan naskah akademik maupun dokumen yang dibutuhkan dalam memperlancar upaya percepatan pengulangan bencana
2. Memperkuat dukungan dalam pengurangan resiko bencana melalui pengembangan jaringan, penguatan kelembagaan bencana di masyarakat dan dunia usaha

Kebijakan :

1. Memenuhi kebutuhan regulasi sebagai upaya untuk mempercepat penanganan bencana serta menggerakkan para pihak berpartisipasi dalam percepatan penaggulangan bencana
2. Mengembangkan akses informasi, guna mendorong para pihak untuk mengurangi resiko bencana

Misi 4. Mengurangi kerentanan, memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana

Strategi :

1. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pembentukan Kelurahan tangguh bencana, dan kelembagaan-kelembagaan lain di masyarakat
2. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan organisasi kebencanaan di masyarakat
3. Memperkuat kerentanan masyarakat melalui pemulihan psikologis dan perbaikan kualitas hidup

Kebijakan :

1. Mengurangi kerentanan, meningkatkan koordinasi, mempercepat respon dan memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bencana.
2. Membangun jaringan antar pelaku penanggulangan bencana dalam rangka memperlancar upaya pengurangan bencana
3. Meningkatkan koordinasi dan integrasi program pengurangan trauma pasca bencana

Misi 5. Mencegah meluasnya kejadian bencana

Strategi :

1. Mempercepat pelayanan korban dalam menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat melalui pembangunan posko-posko penanggulangan bencana, koordinasi lintas sektor, pendataan korban, dan membuka kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam berpartisipasi masa tanggap darurat
2. Meningkatkan pelayanan evaluasi korban melalui perluasan jaringan informasi dan komunikasi, pengembangan akses pelayanan di titik-titik bencana (TKP) dan kerjasama antara instansi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
3. Mempercepat pelayanan korban bencana kebakaran melalui penyusunan SOP, Protap dan tindakan respon cepat

Kebijakan :

1. Melakukan tindakan preventif agar resiko bencana dapat dikurangi, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana baik pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha
2. Melindungi korban bencana terutama perempuan, lansia dan anak-anak
3. Meningkatkan respon time agar kejadian bencana kebakaran tidak meluas.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Perda Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 BPBD Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum khususnya urusan penanggulangan bencana yang meliputi urusan kesiapsiagaan dan pencegahan, penanganan darurat bencana dan evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pada kondisi pra bencana dan pasca bencana dan indikator target secara optimal meminimalkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan, pemulihan dini dan pembangunan pasca bencana yang lebih baik.

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, BPBD Kota Samarinda mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum khususnya urusan penanggulangan bencana mencakup upaya kesiapsiagaan dan pencegahan, penanganan darurat bencana dan evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, pengendalian kepada masyarakat dan lembaga teknis dibidang pekerjaan umum khususnya penyelenggaraan penanganan bencana.
- c. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penyusunan dan penetapan protab penanggulangan bencana, kaji cepat,

pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana, pertanggung jawaban keuangan.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi BPBD Kota Samarinda sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2008, terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana BPBD
2. Sekretariat, yang terdiri atas :
 - a. Subag Umum
 - b. Subag Keuangan
 - c. Subag Perencanaan Program
3. Bidang-bidang yaitu :
 - a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Mitigasi;
 2. Seksi Kesiapsiagaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
 1. Seksi Kedaruratan dan Evakuasi
 2. Seksi Logistik dan Sarana Prasarana
 - c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 1. Seksi Perbaikan dan Pemulihan
 2. Seksi Pembangunan dan Perlindungan

Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kota Samarinda telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 berupa penyediaan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tingkat Kota Samarinda, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Samarinda 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda 2021-2026, RKPD, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda 2011-2031. Sedangkan indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Persentase capaian program prioritas Kota Samarinda dalam RPJMD Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti Samarinda Dalam Angka, Profil Daerah, Delapan Kelompok Data serta dokumen lainnya, guna mengukur seberapa besar capaian kinerja OPD yang dihubungkan dengan capaian program prioritas serta visi-misi Kota Samarinda dalam RPJMD.
2. Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan OPD terhadap dokumen perencanaan OPD; Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan OPD lingkup ekonomi terhadap dokumen perencanaan OPD; dan Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan OPD lingkup sosial budaya terhadap dokumen perencanaan OPD. Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam peningkatan kinerja BPBD Kota Samarinda dalam menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

TABEL TC-30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BPBD KOTA SAMARINDA
KOTA SAMARINDA

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA BPBD			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2021	2022	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
A	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-	-	4	4	4	4	4	4	4	
1	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun	-	-	1	0	1	0	1	0	0	
2	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	-	-	200	250	300	200	200	200	200	
B	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	3	9	9	2	3	n/a	2	

1	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	-	-	1	1	1	1	1	n/a	1	
2	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	-	100	100	100	100	100	35	90	
3	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	1	
4	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	-	-	20	24	10	15	20	n/a	15	
5	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	-	-	2	2	12	2	2	1	1	

6	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	-	-	5	2	5	10	5	4	5	
7	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	-	-	n/a	11	20	n/a	n/a	n/a	n/a	
8	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	-	-	1	1	2	1	1	1	1	
9	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	-	-	70	1000	500	60	70	35	55	
10	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	-	-	n/a	1	2	n/a	n/a	n/a	n/a	
11	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	-	n/a	10	59	n/a	n/a	n/a	n/a	

C	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	3	3	5	n/a	3	2	3	
1	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	-	-	1	1	1	1	1	30	30	
2	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	-	-	1	1	1	1	1	30	30	
3	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-	-	3800	3500	3000	4000	3800	4800	3500	
4	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	3800	3500	1500	4000	3800	4500	3700	

5	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	-	-	1	1	1	1	1	50	50	
6	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	-	-	1	1	1	1	1	1	1	
D	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	2	2	5	n/a	2	2	2	
1	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	-	-	2	3	2	3	2	2	2	
2	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	-	-	2	1	0	2	2	2	2	

3	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	-	-	1	1	3	1	1	1	1	
4	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	
5	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	-	1	1	24	1	1	n/a	1	
6	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	-	-	1	2	2	1	1	1	1	

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, BPBD Kota Samarinda tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. BPBD Kota Samarinda pun memiliki Tantangan dan Peluang dari beberapa masukan masyarakat kota Samarinda agar selalu meningkatkan indeks ketahanan risiko bencana dalam menuju Kota yang Tangguh akan bencana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

- a. Belum semua daerah rawan bencana terlindungi;
- b. Belum optimalnya proses penyaluran bantuan bencana pada masyarakat;
- c. Minimnya regulasi yang mengatur tentang kebencanaan;
- d. Jumlah satgas yang bersertifikat masih belum mencukupi;
- e. Terbatasnya mobil dan/ atau mesin penanggulangan bencana yang masih layak pakai;
- f. Rendahnya akses masyarakat dalam memperoleh bantuan sarana prasarana untuk evakuasi korban;
- g. Masih rendahnya jumlah bangunan rumah korban yang terehabilitasi;
- h. Terbatasnya jumlah WMK yang terbentuk;
- i. Belum optimalnya pembentukan kelurahan tangguh bencana akibat regulasi yang mengatur baru diluncurkan tahun 2013;
- j. Terbatasnya sarana prasarana air minum yang tersedia pada daerah rawan bencana;
- k. Terbatasnya sarana dan prasarana umum pasca bencana;
- l. Belum semua korban bencana yang mengalami trauma tertangani;
- m. Akses dalam mengikuti pelatihan TRC masih rendah.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 dan Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kerja, berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Angka presentase pencapaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung presentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Adapun Hambatan, Kelemahan, Masalah serta Ancaman yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda antara lain:

1. Belum terbangunnya Sistem Informasi & Komunikasi Kebencanaan secara terpadu & terintegrasi
2. Masih terbatasnya sarana & prasarana
3. Terbatasnya jumlah personil Tanggap Darurat yang memiliki keterampilan dasar tentang penanggulangan bencana.
4. Kurangnya dana operasional untuk penanganan penanggulangan bencana yang sifatnya skala kecil namun dalam jumlah yang banyak atau sering terjadi.
5. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis bencana yang beragam.
6. Adanya perubahan Iklim Global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

TABEL TC- 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	53	200.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	53	200.000.000,00	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	100.000.000,00	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	2 Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2 Laporan	50.000.000,00	

			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Realisasi Kinerja SKPD		Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50.000.000,0 0	
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	7 Laporan	6.777.605.973, 00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	7 Laporan	6.777.605.97 3,00	
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	5.947.827.279, 00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	5.947.827.27 9,00	
5.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	779.778.694,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	779.778.694, 00	

6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50.000.000,00	
III.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	19 Laporan	748.086.720,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	19 Laporan	748.086.720,00	
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.990.670,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.990.670,00	
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	375.165.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	375.165.000,00	
9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket	42.350.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket	42.350.000,00	
10.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	38.876.050,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	38.876.050,00	

			yang Disediakan					yang Disediakan			
11.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	22 Laporan	12.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	22 Laporan	12.000.000,00	
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	269.705.000,00	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	269.705.000,00	
IV.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Unit	205.650.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Unit	205.650.000,00	
13.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	183.350.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	183.350.000,00	
14.	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah paket mebel yang disediakan	13 Unit	22.300.000,00	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah paket mebel yang disediakan	13 Unit	22.300.000,00	
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Penyediaan Jasa	48 Laporan	170.500.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Samarinda	Laporan Penyediaan Jasa	48 Laporan	170.500.000,00	

						Pemerintahan Daerah					
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	150.500.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	150.500.000,00	
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	
VI.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Pemeliharaan	16 Laporan	519.874.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Pemeliharaan	16 Laporan	519.874.000,00	
17.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	168.285.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	168.285.000,00	

						Kendaraan Dinas Jabatan					
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	316.589.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	316.589.000,00	
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.000.000,00	
B.	Program Penanggulangan Bencana					Program Penanggulangan Bencana					
VII.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	4 Jenis	610.000.000,00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	4 Jenis	610.000.000,00	
20.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	310.000.000,00	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	310.000.000,00	

21.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 Orang	300.000.000,00	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 Orang	300.000.000,00	
VIII .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Samarinda	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9 Jenis	5.769.086.413,00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Samarinda	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9 Jenis	5.769.086.413,00	
22.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	250.000.000,00	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan	1 Dokumen	250.000.000,00	

								Bencana yang Dilegalisasi			
23.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	250 Orang	350.000.000,00	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	250 Orang	350.000.000,00	
24.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	731.299.763,00	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	731.299.763,00	
25.	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kota Samarinda	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	25 Unit	416.650.000,00	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kota Samarinda	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	25 Unit	416.650.000,00	
26.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada	2 Dokumen	1002E200.000.000,00	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada	2 Dokumen	1002E200.000.000,00	

			Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana					Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana			
27.	Penguatan kapasitas kawasan dan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kota Samarinda	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	1.000.000.000,00	Penguatan kapasitas kawasan dan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kota Samarinda	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	1.000.000.000,00	
28.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	11 Orang	239.662.000,00	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	11 Orang	239.662.000,00	
29.	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	250.000.000,00	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	250.000.000,00	
30.	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1000 Orang	831.474.650,00	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1000 Orang	831.474.650,00	

31.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	250.000.000,00	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	250.000.000,00	
32.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	250.000.000,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	250.000.000,00	
IX.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Samarinda	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5 Jenis	2.496.073.100,00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Samarinda	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5 Jenis	2.496.073.100,00	
33.	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	120.000.000,00	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	120.000.000,00	
34.	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan	1 Dokumen	120.000.000,00	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan	1 Dokumen	120.000.000,00	

			Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat					Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			
35.	Pencarian, Pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3300 Orang	1.200.000.000, 00	Pencarian, Pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3300 Orang	1.200.000.00 0,00	
36.	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3300 Orang	851.073.100,00	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3300 Orang	851.073.100, 00	
37.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	95.000.000,00	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	95.000.000,0 0	

38.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kota Samarinda	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	110.000.000,00	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kota Samarinda	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	110.000.000,00	
III.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulan n Bencana	5 Jenis	1.975.999.940,00	Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulan gan Bencana	5 Jenis	1.975.999.940,00	
39.	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggara n Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan regulasi penanggulang an bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggar aan Penanggulang an Bencana di Daerah	3 Dokumen	200.000.000,00	
40.	Penguatan kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	Penguatan kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	
41.	Kerjasama antar lembaga dan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Kerja	1 Dokumen	150.000.000,00	Kerjasama antar lembaga	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	

	kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			dan kemitraan dalam Penanggulan Bencana Kabupaten/Kota		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulan Bencana			
42.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kota Samarinda	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	250.000.000,00	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kota Samarinda	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	250.000.000,00	
43.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	200.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulan Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulan Bencana	1 Laporan	200.000.000,00	
44.	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	2 Dokumen	975.999.940,00	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	2 Dokumen	975.999.940,00	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam upaya mensukseskan program dan kegiatan pembangunan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan program yang diarahkan pada peningkatan kinerja dan sinergitas pemerintahan, dalam upaya meningkatkan hal-hal tersebut di atas, BPBD Kota Samarinda akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Beberapa Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat sudah ada masuk tetapi tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda melainkan masuk ke dalam tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda sehingga usulan tersebut kami pindahkan kepada OPD yang bersangkutan.

TABEL TC-32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Kota Samarinda Tahun 2021**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Tidak Ada Usulan				
2	Tidak Ada Usulan				
3	Tidak Ada Usulan				
4	Tidak Ada Usulan				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah otonom berhak, berwenang dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007.

Tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6, meliputi :

- a. Pengurangan resiko bencana dan pepaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana
- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai.
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai, dan
- g. Pemeliharaan arsip/ dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana

Sementara wewenang Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 7, adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi
 - a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional,
 - b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana
 - c. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah
 - d. Penentuan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain
 - e. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana
 - f. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan, dan
 - g. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala nasional.
- 2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi :
 - a. Jumlah korban
 - b. Kerugian harta benda
 - c. Kerusakan prasarana dan sarana
 - d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan
 - e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Presiden.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Renja BPBD mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota

Samarinda Tahun 2021-2026. Adapun visi BPBD Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah ***"Terwujudnya Lembaga dan Masyarakat Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana"***.

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi BPBD Kota Samarinda tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana
3. Merumuskan regulasi yang mendukung upaya-upaya percepatan penanggulangan bencana
4. Mengurangi kerentanan, memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
5. Mencegah meluasnya kejadian bencana

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA BPBD Kota Samarinda Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan ingin dicapai adalah :

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhana Wata'ala.
- b. Peningkatan kinerja organisasi dalam koridor Good Government.
- c. Peningkatan kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas, membangun system pencegahan dan kesiapsiagaan.
- d. Pelaksanaan penanganan darurat dan logistic secara terencana, terpadu, terkoordinasi, cepat dan tepat.
- e. Pelaksanaan system kaji cepat, dan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpadu, terkendali, transparan dan akuntabel dengan dukungan peralatan dan alat memadai

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi, beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhana Wata'ala.
- b. Terlaksananya tata laksana organisasi yang efisien dengan pemberdayaan staf yang optimal.
- c. Terlaksananya bimbingan teknis kepada aparatur, swasta (PMK swasta) dan kelompok masyarakat (tenaga sukarelawan, balakarcana, balakarkotadsj) untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan, pemahaman terhadap system pengurangan resiko bencana (PRB) dan mitigasi adaptasi perubahan iklim (MAPI) guna membangun ketangguhan daerah.
- d. Terlaksananya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan system logistic dan peralatan penanggulangan bencana.
- e. Terlaksananya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik disbanding sebelum bencana melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarus utamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan visi BPBD Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah **"TERWUJUDNYA LEMBAGA DAN MASYARAKAT YANG TANGGUH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA"** maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPBD Kota Samarinda tahun 2023 terdiri dari :

Adapun rencana program dan kegiatan yang direncanakan untuk Tahun 2023 sebagai berikut:

TABEL TC-33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				8.621.716.693,00				8.514.837.668,00
1	05	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Kota Samarinda	53	200.000.000,00	APBD		53	106.090.000,00
05	01	2	01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	5 Dokumen	100.000.000,00	APBD		5 Dokumen	50.000.000,00
05	01	2	01	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Kota Samarinda	2 Laporan	50.000.000,00	APBD		2 Laporan	36.090.000,00
05	01	2	01	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	4 Laporan	50.000.000,00	APBD		4 Laporan	20.000.000,00
1	05	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan		7 Laporan	6.777.605.973,00	APBD		7 Laporan	6.269.169.000,00

05	01	2	01	000 7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	36 Orang	5.947.827.279,00	APBD		36 Orang	5.462.888.000,00
05	01	2	02	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	12 Dokumen	779.778.694,00	APBD		12 Dokumen	756.281.000,00
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	5 Laporan	50.000.000,00	APBD		5 Laporan	50.000.000,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Kota Samarinda	19 Laporan	748.086.720,00	APBD		19 Laporan	574.078.668,00
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	5 Paket	9.990.670,00	APBD		5 Paket	20.000.000,00
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	5 Paket	375.165.000,00	APBD		5 Paket	140.000.000,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	27 Paket	42.350.000,00	APBD		27 Paket	29.078.668,00
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Paket	38.876.050,00	APBD		2 Paket	10.000.000,00

					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kota Samarinda	22 Laporan	12.000.000,00	APBD		22 Laporan	25.000.000,00
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	12 Laporan	269.705.000,00	APBD		12 Laporan	350.000.000,00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Kota Samarinda	1 Unit	205.650.000,00	APBD		1 Unit	375.000.000,00
					Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Unit	183.350.000,00	APBD		1 Unit	350.000.000,00
					Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kota Samarinda	13 Unit	22.300.000,00	APBD		13 Unit	25.000.000,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Kota Samarinda	48 Laporan	170.500.000,00	APBD		48 Laporan	170.500.000,00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	36 Laporan	150.500.000,00	APBD		36 Laporan	150.000.000,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	20.000.000,00	APBD		12 Laporan	90.000.000,00

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Kota Samarinda	16 Laporan	519.874.000,00	APBD		16 Laporan	1.020.000.000,00
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda	30 Unit	168.285.000,00	APBD		30 Unit	480.000.000,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda	10 Unit	316.589.000,00	APBD		10 Unit	450.000.000,00
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	1 Unit	35.000.000,00	APBD		1 Unit	90.000.000,00
01	05	03			Program Penanggulangan Bencana		Kota Samarinda		10.851.159.453,00	APBD			10.391.299.763,00
01	05	03	2	01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Kota Samarinda	4 Jenis	610.000.000,00	APBD		4 Jenis	300.000.000,00
05	03	2	01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Kota Samarinda	1 Dokumen	310.000.000,00	APBD		-	-

05	03	2	01	000 4	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Kota Samarinda	300 Orang	300.000.000,00	APBD		300 Orang	300.000.000,00
1	05	03	2	02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Samarinda	9 Jenis	5.769.086.413,00	APBD		9 Jenis	4.921.299.763,00
05	03	2	02	001 4	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000,00	APBD		1 Dokumen	370.000.000,00
05	03	2	02	001 6	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kota Samarinda	250 Orang	350.000.000,00	APBD		250 Orang	350.000.000,00

05	03	2	02	001 7	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	1 Dokumen	731.299.763,00	APBD		1 Dokumen	731.299.763,00
05	03	2	02	001 5	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Kota Samarinda	25 Unit	416.650.000,00	APBD		25 Unit	620.000.000,00
05	03	2	02	001 3	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Kota Samarinda	2 Dokumen	1.200.000.000,00	APBD		2 Dokumen	270.000.000,00
05	03	2	02	000 6	Penguatan kapasitas kawasan dan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Samarinda	5 Kawasan	1.000.000.000,00	APBD		5 Kawasan	430.000.000,00
05	03	2	02	000 8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kota Samarinda	11 Orang	239.662.000,00	APBD		11 Orang	250.000.000,00
05	03	2	02	000 9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000,00	APBD		1 Dokumen	350.000.000,00

						Dilegalisasi							
05	03	2	02	001 0	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kota Samarinda	1000 Orang	831.474.650,00	APBD		1000 Orang	1.000.000.000,00
05	03	2	02	001 1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000,00	APBD		1 Dokumen	300.000.000,00
05	03	2	02	001 2	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kota Samarinda	10 Keluarga	250.000.000,00	APBD		10 Keluarga	250.000.000,00
1	05	03	2	03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Samarinda	5 Jenis	2.496.073.100,00	APBD		5 Jenis	3.120.000.000,00
05	03	2	03	000 1	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Kota Samarinda	1 Laporan	120.000.000,00	APBD		1 Laporan	130.000.000,00
05	03	2	03	000 2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam	Kota Samarinda	1 Dokumen	120.000.000,00	APBD		1 Dokumen	130.000.000,00

						berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat							
05	03	2	03	0003	Pencarian, Pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kota Samarinda	3300 Orang	1.200.000.000,00	APBD		3300 Orang	1.300.000.000,00
05	03	2	03	0009	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Samarinda	3300 Orang	851.073.100,00	APBD		3300 Orang	1.300.000.000,00
05	03	2	03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kota Samarinda	1 Laporan	95.000.000,00	APBD		1 Laporan	130.000.000,00
05	03	2	03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Kota Samarinda	1 Dokumen	110.000.000,00	APBD		1 Dokumen	130.000.000,00

1	05	03	2	04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Samarinda	5 Jenis	1.975.999.940,00	APBD		5 Jenis	2.050.000.000,00
05	03	2	04	000 1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kota Samarinda	3 Dokumen	200.000.000,00	APBD		3 Dokumen	350.000.000,00
05	03	2	04	000 2	Penguatan kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Kota Samarinda	1 Dokumen	200.000.000,00	APBD		1 Dokumen	330.000.000,00
05	03	2	04	000 3	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kota Samarinda	1 Dokumen	150.000.000,00	APBD		1 Dokumen	300.000.000,00
05	03	2	04	000 4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Kota Samarinda	1 Dokumen	250.000.000,00	APBD		1 Dokumen	270.000.000,00
05	03	2	04	000 5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kota Samarinda	1 Laporan	200.000.000,00			1 Laporan	250.000.000,00
05	03	2	04	001 0	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan	Kota Samarinda	2 Dokumen	975.999.940,00	APBD		2 Dokumen	550.000.000,00

						Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Target	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							19,472,876,146			18,906,137,431			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							8.621.716.693			8.514.837.668			
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							200,000,000			106,090,000			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai AKIP			4 Dokumen		100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		50,000,000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Nilai AKIP			1 Dokumen		50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		36,090,000

					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP			4 Dokumen		50.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)		20,000,000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,777,605,973					6.269.169.000,00	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhnya Keuangan Perangkat Daerah		78	36 Orang/bulan	Laporan	5.947.827.279,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	78	5.462.888.000,00
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Terpenuhnya Keuangan Perangkat Daerah		78	18 Orang	7 Laporan	779.778.694,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	78	756.281.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhi nya Keuangan Perangkat Daerah		78	5 Laporan	7 Laporan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	50,000,000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								748.086.720	574.078.668				
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan		78	5 Jenis	19 Laporan	9,990,670	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	20,000,000

1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan		78	5 Jenis	19 Laporan	375.165.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	140.000.000,00
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan		78	27 Jenis	19 Laporan	42.350.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	29.078.668,00
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan		78	1 Laporan	19 Laporan	38.876.050,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	10.000.000,00
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Jumlah Laporan		78		19 Laporan	12.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	25.000.000,00
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah SPPD	Jumlah Laporan		78	12 SPPD	19 Laporan	269.705.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	350.000.000,00

					Koordinasi dan Konsultasi SKPD									(PAD)		Masyara kat (IKM)		
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								205,650,000					375,000,000
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		78	1 Unit	1 Unit	183,350,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasa n Masyara kat (IKM)	78	350,000,000
					Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket			13 Unit		22,300,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasa n Masyara kat (IKM)	78	25,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					170,500,000	170,500,000							

1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa		78	36 Bukti Pembayaran	136 Laporan	150.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	150.000.000,00
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa		78	100 Bukti Pembayaran	136 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	90.000.000,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							519.874.000					1,020,000,000	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Laporan Pemeliharaan		78	20 Unit	16 Laporan	168,285,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	480,000,000

1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Laporan Pemeliharaa n		78	7 Unit	16 Laporan	316.589.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasa n Masyara kat (IKM)	78	450.000.000,00
1	05	01	2.09	09	Pemelihara an/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Laporan Pemeliharaa n		78	1 Gedung	16 Laporan	35.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasa n Masyara kat (IKM)	78	90.000.000,00
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							10.851.159.453				10.391.299.763		
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							610,000,000				300,000,000		

					Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana			1 Dokumen	3 Jenis	310,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		-
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada	Jumlah jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	38,01 %	5 Kali	3 Jenis	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	300,000,000	

							Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya										
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							5,769,086,413					4.921.299.763

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		38,01 %	1 Dokumen	4 Jenis	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan	38,01 %	370,000,000

															sarana prasarana tanggap darurat lengkap		
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	38,01 %	100 Orang	4 Jenis	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	350,000,000
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	38,01 %	200 Orang	4 Jenis	731.299.763	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan	38,01 %	731.299.763

					Kabupaten/ Kota		Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota								menggu nakan sarana prasaran a tanggap darurat lengkap		
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		38,01 %	1200 Orang	4 Jenis	416,650,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persenta se korban bencana yang dievakuasi dengan menggu nakan sarana prasaran a tanggap darurat lengkap	38,01 %	620,000,000
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		38,01 %	2 Dokumen	4 Jenis	1,200,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persenta se korban bencana yang dievakuasi dengan	38,01 %	270,000,000

							Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulka n Bencana								menggu nakan sarana prasaran a tanggap darurat lengkap		
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegaha n dan Kesiapsiaga an	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Penguatan Kelurahan/D esa Tangguh Bencana	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		38,01 %	5 Destana	4 Jenis	1,000,000,00 0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persenta se korban bencana yang dievakuasi dengan menggu nakan sarana prasaran a tanggap darurat lengkap	38,01 %	430,000,000
1	05	03	2.02	08	Pengemban gan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Personil TRC yang Dikembangk an Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		38,01 %	11 Orang	4 Jenis	239,662,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persenta se korban bencana yang dievakuasi dengan	38,01 %	250,000,000

															menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		38,01 %	1 Dokumen	4 Jenis	250,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persenta se korban bencana yang dievakua si dengan menggu nakan sarana prasaran a tanggap darurat lengkap	38,01 %	350,000,000

1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		38,01 %	80 Orang	4 Jenis	831,474,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	1,000,000,000
1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		38,01 %	1 Dokumen	4 Jenis	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	300,000,000

1	05	03	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		38,01 %	2 Keluarga	4 Jenis	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	250,000,000
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								790,000,000				2,870,000,000
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		38,01 %	30 Menit	3 Jenis	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap	38,01 %	120,000,000

															darurat lengkap			
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		38,01 %	30 Menit	3 Jenis	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	130,000,000
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		38,01 %	3500 Orang	3 Jenis	1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan	38,01 %	1,300,000,000

															menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		38,01 %	3500 Orang	3 Jenis	851,073,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	1,300,000,000

1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		38,01 %	50 Orang	3 Jenis	95,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	130,000,000
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		38,01 %	1 Jam	3 Jenis	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	130,000,000

1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								1.975.999.940					2,050,000,000
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		38,01 %	3 Dokumen	4 Jenis 2 Jenis	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	350,000,000
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		38,01 %	2 Kelembagaan	4 Jenis 2 Jenis	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap	38,01 %	330,000,000

															darurat lengkap			
1	05	03	2.04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		38,01 %	1 Kerjasama	4 Jenis 2 Jenis	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	300,000,000
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Penataan Sistem		38,01 %	1 Jenis	4 Jenis 2 Jenis	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan	38,01 %	270,000,000

							Dasar Penanggula ngan Bencana								menggu nakan sarana prasaran a tanggap darurat lengkap		
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasa n Penyelengg araan Penanggula ngan Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggar aan Penanggula ngan Bencana	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggula ngan Bencana		38,01 %	1 Jenis	1 Laporan	200,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persenta se korban bencana yang dievakuasi dengan menggu nakan sarana prasaran a tanggap darurat lengkap	38,01 %	250,000,000
1	05	03	2.04	010	Koordinasi Penangana n Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah penyelesaia n kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		38,01 %	1 Jenis	2 Dokumen	975.999.940	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persenta se korban bencana yang dievakuasi dengan	38,01 %	550,000,000

							Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggula ngan Bencana								menggu nakan sarana prasaran a tanggap darurat lengkap		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda ini merupakan tindak lanjut dari Dokumen Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 yang memuat tentang rencana pelaksanaan dan aktualisasi kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda dalam pencapaian visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 merupakan rencana kinerja dari semua program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda selama satu tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada dasar pelaksanaannya mengacu pada visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ***"Terwujudnya Lembaga dan Masyarakat Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana"***.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2024 ini adalah dengan memberikan prioritas kegiatan dalam upaya penanggulangan bencana. Prioritas program dan kegiatan Tahun 2024 yang tercakup dalam prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah :

- 1) Penanganan Pra Bencana (Pencegahan dan Kesiapsiagaan)
- 2) Penanganan Tanggap Darurat (Kedaruratan dan Logistik)
- 3) Penanganan Pasca Bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 ini disusun, semoga dapat menjadi acuan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2024.

Samarinda, 05 Juli 2023
Kepala Pelaksana,

SUWARSO, A.Ks., M.Si
NIP. 196909201991121001

